

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Metode Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Definisi Metode Pemberdayaan

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti jalan yang ditempuh. Secara ilmiah, metode sebenarnya berkaitan dengan masalah kerja guna memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi dari metode itu sendiri sebenarnya adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi sebenarnya berasal dari dua kata yaitu *methodos* dan *logos*, kata metode sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melalui sedangkan *hodos* sendiri berarti jalan atau jalan. Jadi metode mempunyai arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Arti kata *logos* adalah ilmu. Jika kata *methodos* dan *logos* digabungkan menjadi kata metodologi, maka dapat diartikan bahwa metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu untuk memperoleh kebenaran itu, tergantung pada kenyataan yang dipelajari. Metodologi pemberdayaan masyarakat berarti prosedur yang lebih rinci mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan suatu pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Metode pemberdayaan juga di jelaskan dalam al-Qur'an pada surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Semua (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan

---

<sup>1</sup>Muhtadi dan Tantang Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 69

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl:125)

Ayat di atas ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan sebuah pemberdayaan tidak selalu hanya dengan kegiatan sosial tetapi juga dapat menggunakan pemberdayaan dengan metode dakwah dengan memperhatikan tingkat kemampuan si penerima materi pemberdayaan dan tetap sesuai dengan nilai ajaran islam.<sup>2</sup>

#### **b. Macam-macam Metode Pemberdayaan Masyarakat**

Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu sebelum kita melakukan sebuah pemberdayaan kita harus mengetahui karakteristik masing-masing masyarakat. Dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adalah salah satu cara agar pemberdayaan dapat berjalan lancar dan sukses. Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

##### 1) RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA merupakan sebuah metode dengan menggunakan penilaian keadaan desa secara cepat, dan dalam prakteknya, metode RRA lebih banyak dilaksanakan oleh "orang luar" tanpa melibatkan masyarakat setempat.

##### 2) PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA merupakan sebuah metode penyempurna dari metode RRA. PRA lebih banyak dilaksanakan dengan mengikut sertakan "orang dalam" atau masyarakat sekitar yang

---

<sup>2</sup> Masrul Efendi Umar Harahap, Metode Pemberdayaan Berbasis Dakwah, *Jurnal at-Taghyir* 3, no 1 (2020): 151-152

terdiri dari dari semua *stakeholders* yang difasilitasi oleh orang luar. Fungsi dari orang luar sendiri adalah sebagai fasilitator atau narasumber dibandingkan mereka berperan sebagai instruktur atau guru yang menggurui.<sup>3</sup>

Metode PRA juga memiliki arti sebuah cara yang digunakan dalam melaksanakan kajian guna memahami keadaan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Robert Chambers PRA adalah suatu pendekatan dan metode yang digunakan untuk mendorong masyarakat pedesaan agar ikut serta dalam meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai kondisi hidup mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan sesuai dengan kondisi mereka.<sup>4</sup>

Metode PRA ini sering dianggap bahwa PRA hanya sekedar metode "pengkajian" atau metode "penelitian" (oleh) masyarakat saja. Oleh sebab itu metode PRA menggunakan 11 prinsip dalam melaksanakan pemberdayaan, diantaranya adalah :

- a) Prinsip Mengutamakan yang Terabaikan (Keberpihakan)

Keberpihakan kepada kelompok yang terabaikan bukan berarti bahwa masyarakat *elite* harus mendapat giliran untuk diabaikan. Namun keberpihakan ini merupakan sebuah upaya untuk mencapai suatu keseimbangan perlakuan terhadap berbagai golongan yang ada di masyarakat dengan lebih mengutamakan golongan yang paling miskin guna meningkatkan kehidupan mereka.

---

<sup>3</sup>Muhtadi dan Tantang Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 71

<sup>4</sup> *Acuan Penerapan Partisipatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara*, (Bandung: Driya Media, 1996), 13-15

- b) Prinsip Pemberdayaan (penguatan) Masyarakat.

Metode PRA bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat, pengkajian keadaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, pemberian penilaian, dan koreksi terhadap kegiatan yang berlangsung. Masyarakat memiliki kesempatan dan kontrol terhadap berbagai keadaan yang terjadi pada kehidupannya. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari "orang luar".<sup>5</sup>

- c) Prinsip Masyarakat Sebagai Pelaku, Orang Luar Sebagai Fasilitator.

Orang Luar harus sadar peran mereka sebagai fasilitator bukan sebagai "guru", "penyuluh", atau bahkan sebagai "instruktur". Hal seperti ini memang mudah untuk diucapkan namun terkadang masih banyak kesalahan dalam prakteknya, karena banyak anggapan bahwa masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang bodoh. Maka dari itu perlu sikap rendah hati, serta belajar dari masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan mereka. Masyarakat juga dilibatkan dalam pembuatan kegiatan-kegiatan untuk mereka sendiri.

- d) Prinsip Saling Belajar dan Menghargai Perbedaan.

Salah satu prinsip dasar adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataannya memperlihatkan

---

<sup>5</sup> Acuan Penerapan *Participatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara*, (Bandung: Driya Media, 1996), 21

bahwa dalam banyak hal perkembangan penganlaman dan pengetahuan masyarakat tradisional tidak dapat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak dapat memecahkan masalah yang terus berkembang. Namun sebaliknya, bahwa pengetahuan "modern" yang diperkenalkan oleh "orang luar" juga tidak dapat memecahkan mereka karena tidak sesuai. Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan orang luar saling melengkapi dan sama bernilainya, proses PRA adalah suatu ajang komunikasi antara kedua pengetahuan untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik.<sup>6</sup>

e) Prinsip Santai dan Informal

Selanjutnya kegiatan PRA dilaksanakan dalam suasana yang bersifat luwes, tidak memaksa, terbuka dan informal. Sistuisi yang seperti ini akan membuat hubungan lebih santai dan akrab, karena orang luar akan berproses masuk dan menjadi anggota masyarakat, bukan sebagai "tamu asing" dan masyarakat harus menyambut dengan segala protokol. Harapan dari penerapan PRA tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Orang luar harus memperhatikan jadwal dari kegiatan masyarakat bukan sebaliknya, bahwa masyarakat yang harus mengikuti jadwal orang luar yang nantinya akan mengganggu dalam kegiatan PRA.

f) Prinsip Triangulasi.

Salah satu kegiatan PRA adalah usaha pengumpulan data secara sistematis

---

<sup>6</sup> Acuan Penerapan *Participatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara*, (Bandung: Driya Media, 1996), 22

bersama masyarakat. Namun tidak semua sumber informasi itu selalu dapat dipercaya kebenarannya. Guna mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kita bisa menggunakan metode *triangulasi* yang merupakan sebuah bentuk "*pemeriksaan dan pemeriksaan ulang*" informasi.<sup>7</sup>

g) Prinsip Mengoptimalkan Hasil

Upaya pengumpulan informasi seringkali dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan sebagian besar informasi tersebut tidak digunakan. Tim pemandu ketika hendak melakukan persiapan perlu mendefinisikan dengan jelas, jenis dan tingkat kedalaman informasi yang dibutuhkan. Namun, tim pemandu juga tidak boleh lupa bahwa informasi yang dibutuhkan oleh tim pemandu harus mendengarkan pendapat masyarakat.

h) Prinsip Orientasi Praktis.

PRA berorientasi praktis, yakni pengembangan kegiatan. Oleh karena itu dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai, agar program yang dikembangkan dapat memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Penerapan metode PRA tidak hanya sekedar untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, melainkan untuk melanjutkan kedalam kegiatan bersama.

i) Prinsip Keberlanjutan dan Selang Waktu.

PRA merupakan sebuah metode yang harus ditekuni oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program yang mereka kembangkan atau mereka jalankan

---

<sup>7</sup> Acuan Penerapan *Participatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara*, (Bandung: Driya Media, 1996), 23

secara berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar PRA yang mencoba menggali potensi masyarakat.<sup>8</sup>

j) Prinsip Belajar dari Kesalahan.

Melakukan kesalahan dalam kegiatan PRA adalah suatu hal yang wajar. Kesempurnaan adalah sesuatu hal yang sulit untuk dicapai, melainkan penerapan secara baik dan tepat sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian kita belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Kegiatan PRA bukanlah kegiatan "coba-coba" yang tanpa perhitungan, kita harus mengurangi kesalahan.

k) Prinsip Terbuka

Prinsip ini menganggap bahwa metode PRA sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, sempurna dan pasti benar. Diharapkan teknik-teknik ini senantiasa dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat. Artinya teknik-teknik ini bukan tidak mungkin untuk melakukan pembaruan ataupun penambahan teknik.<sup>9</sup>

3) FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD adalah interaksi yang dilakukan oleh individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal dan di pandu oleh seorang pemandu (moderator) yang mengarahkan mereka untuk mendiskusikan pengalaman mereka tentang sebuah program yang sedang mereka ikuti.<sup>10</sup>

Pemilihan partisipan atau peserta diskusi dilakukan dengan sangat selektif dan hal ini

---

<sup>8</sup> Acuan Penerapan Partisipatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara, (Bandung: Diya Media, 1996), 26

<sup>9</sup> Acuan Penerapan Partisipatory Rural Appraisal, Berbuat Bersama Berperan Setara, (Bandung: Diya Media, 1996), 27

<sup>10</sup> Muhtadi dan Tantang Hermansyah, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 71

juga tergantung dari topik yang akan didiskusikan (dalam hal ini, topik yang akan didiskusikan seharusnya topik yang relevan dengan program pemberdayaan masyarakat) dan metode FGD ini dapat dikatakan "berhasil" itu tergantung dari pemandu atau moderator FGD.<sup>11</sup>

4) PLA (*Participatory Learning and Action*)

PLA adalah sebuah bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang terdahulu dan dulu dikenal dengan nama *learning by doing* atau belajar sambil bekerja. PLA adalah sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang diawali dari proses belajar tentang sebuah topik, baru kemudian dilakukan aksi yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.

5) SL atau Sekolah Lapangan (*Farmers Field School*)

SL atau Sekolah Lapangan adalah sebuah metode pemberdayaan dimana metode ini dijalankan oleh sekelompok orang atau masyarakat atau organisasi yang kemudian mereka berkumpul dengan pembahasan awal tentang persoalan yang sedang mereka hadapi, lalu mendengarkan pendapat-pendapat dari setiap orang, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang bagaimana cara untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki.<sup>12</sup>

6) Pelatihan Partisipati

Secara *harfiah*, partisipasi memiliki arti "ikut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keterlibatan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "keaktifan masyarakat atau kelompok dalam kegiatan". Dari sudut pandang

---

<sup>11</sup> Nasdian, Freadian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 119

<sup>12</sup> Muhtadi dan Tantang Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 72



terminologi partisipasi masyarakat adalah sebagai suatu cara untuk melaksanakan interaksi antara dua kelompok yaitu kelompok elit dan kelompok yang selama ini tidak pernah diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi menurut Mubyarto adalah suatu kesadaran untuk membantu keberhasilan suatu program yang sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Pasaribu dan Simanjuntak berkata bahwa sumbangan dalam suatu partisipasi dapat disusun secara rinci menurut jenis-jenisnya, yang sebagai berikut:

- a) Partisipasi Buah Pikiran, yang artinya mereka berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat atau gagasan dalam sebuah pertemuan atau rapat.
- b) Partisipasi Tenaga, dalam artian mereka ikut berpartisipasi dengan menggunakan tenaga mereka baik itu ketika kegiatan pembangunan desa, atau pertolongan bagi orang lain yang sedang membutuhkan bantuan.
- c) Partisipasi Harta Benda, adalah menyumbangkan harta, benda yang mereka miliki guna kepentingan atau kegiatan sosial baik itu pembangunan desa ataupun untuk membantu orang yang sedang membutuhkan.
- d) Partisipasi Keahlian dan Kemahiran, yang diberikan oleh orang agar mendorong aneka bentuk usaha dan industri.
- e) Partisipasi Sosial, ikut serta dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar seperti arisan, melayat dan kondangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora), 36-40

## 2. Pemberdayaan

### a. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata "*power*" yang artinya "*control, authority, dominan*". Awalan "*emp*" memiliki arti "*on put to*" atau "*to cover with*" jelasnya "*more power*". Jadi *empowering* artinya "*is passing on authority and responsibility*", yaitu lebih berdaya dari sebelumnya dalam artian wewenang dan tanggung jawab juga termasuk kemampuan individual yang mereka miliki.<sup>14</sup>

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, sedangkan memberdayakan merupakan arti dari kata *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti yaitu : (1) *to give power* atau *authority to* atau dapat diartikan dengan kata memberi kekuasaan, atau kekuatan otoritas ke pada pihak lain, (2) *to give ability to* atau *enable* atau suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan guna memulihkan keberdayaan suatu komunitas atau masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melakukan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.<sup>15</sup>

Secara umum pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dianjurkan untuk memperluas akses masyarakat guna mencapai keadaan sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi, dibandingkan dengan keadaan

---

<sup>14</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Sipil*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2007), 309

<sup>15</sup> Erni Febrian Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no 2 (2012): 78-79

sebelum dilakukannya pemberdayaan. Menurut Ibnu Kaldun, pemberdayaan secara terminologi adalah membina dan meningkatkan kualitas. Menurut pemikiran sosiologis Ibnu Kaldun, menjelaskan bahwa manusia secara individu itu diberikan kelebihan, tetapi secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga suatu kelebihan itu harus dibina agar dapat mengembangkan potensi yang ada didalam diri mereka, guna bertujuan untuk membuat mereka lebih berdaya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal ditahun gajah atau tahun 570 M inilah yang menjadi awal dari perjalanan panjang dari sebuah pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup> Beberapa pendapat lain tentang pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan menurut Robert dan Greene dalam Damanik dan Pattiasiana (2009: 93), merupakan sebuah proses bagaimana seseorang atau masyarakat semakin cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kendali dan memengaruhi peristiwa hidup mereka.
- 2) Menurut Clutterbuck yang di kutib dari Syarif Makmur (2008:54), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk mendorong dan memungkinkan bagi individu-individu untuk mengemban tanggung jawab atas upaya yang mereka gunakan untuk memperbaiki cara kerja mereka dan guna menyumbang pada pencapaian tujuan organisasi.<sup>17</sup>
- 3) Pemberdayaan menurut World Bank (2001) adalah sebagai suatu upaya guna memberikan kesempatan dan kemampuan pada kelompok masyarakat miskin untuk bisa dan berani untuk bersuara (*voice*) atau mengutarakan pendapat mereka, dan menyuarakan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka, serta berani dan mampu untuk

---

<sup>16</sup> Muhtadi dan Tantang Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 6-7

<sup>17</sup> Suparno, Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 202

memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik menurut mereka pribadi, keluarga dan juga masyarakatnya. Singkatnya, pemberdayaan masyarakat memiliki arti suatu proses guna meningkatkan kemampuan dan sikap mandiri kepada masyarakat.<sup>18</sup>

- 4) Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah sebuah cara dimana masyarakat, organisasi, dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupan mereka sendiri.<sup>19</sup>
- 5) Secara lebih rinci Slamet berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang dapat membuat masyarakat atau organisasi mampu untuk membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Kata istilah ini memiliki makna, berdaya, termotivasi mempunyai kesempatan, paham, berenergi, melihat dan memanfaatkan peluang, dapat berkerjasama mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dapat mencari dan menangkap informasi dan juga mampu bertindak sesuai inisiatif.<sup>20</sup>
- 6) Menurut Swift & Levin, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk
  - a) Memiliki akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.
  - b) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhi mereka.

---

<sup>18</sup> Totok Mardikanto, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2013), 41

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 59

<sup>20</sup> Oos, M. Anwa, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 49-50

Pemberdayaan mengacu pada upaya untuk mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>21</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya pemberdayaan adalah berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa manusia dituntut untuk berusaha demi mencapai apa yang mereka inginkan.<sup>22</sup>

Tugas dari seorang pengorganisir adalah sebagai fasilitator. Seorang pengorganisir fasilitator merupakan seseorang yang paham akan peran-peran yang mereka jalankan didalam sebuah organisasi, dan juga memiliki keterampilan teknis untuk menjalankannya. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan memfasilitasi proses-proses yang membantu, memperlancar, dan mempermudah anggotanya agar nanti mereka dapat melakukan

---

<sup>21</sup> Totok Mardikanto, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: UNS Press, 2013), 40-41

<sup>22</sup> Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Al-Qur'an*, *Jurnal Hikmah* 11, no 2 (2017): 193

semua peran yang pernah dijalankan oleh sang pengorganisir.<sup>23</sup>

Telah dijelaskan di atas beberapa pengertian tentang pemberdayaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat atau individu lebih berdaya dari yang sebelumnya baik dalam tanggung jawab, wewenang ataupun kemampuan yang mereka miliki. Beberapa teori di atas telah mengemukakan bahwa pemberdayaan diupayakan untuk kelompok atau masyarakat lemah agar meningkatkan kekuatan atau kemampuan mereka agar lebih berdaya dan memiliki daya saing seperti yang lainnya. Dalam penelitian kali ini difokuskan pada pemberdayaan anggota ansor.

#### **b. Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi aktif masyarakat dalam efisiensi, efektivitas dan sikap kemandirian. Pemberdayaan dilakukan melalui kerja sama dengan para sukarelawan, yang bukan dari pemerintah, tetapi dari organisasi dan pergerakan masyarakat dan bisa juga dari LSM. Menurut Clarke bahwa partisipasi merupakan cara efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan kata lain strategi pemberdayaan partisipasi membuat masyarakat kecil dapat ikut menyuarakan suara mereka tentang keluhan-keluhan ataupun juga pendapat mereka. Dengan begitu mereka dapat mengatasi masalah yang mereka sendiri dan menjadikan mereka lebih mandiri.<sup>24</sup>

Sebagai pekerja sosial kita harus mengerti klien atau masyarakat yang perlu kita berdayakan mencakup individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Ketika akan melakukan

---

<sup>23</sup> Jo Hann Tan & Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat (Releksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara)*, (Yogyakarta: Institut Press, 2003), 43

<sup>24</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2013), 4

pemberdayaan diperlukan strategi yang sesuai dengan keadaan klien. Namun secara garis besar strategi dapat dilihat dari tiga bentuk intervensi pekerjaan sosial. Tiga bentuk intervensi tersebut diantaranya adalah intervensi mikro yang diperuntukkan bagi individu dan keluarga. Teknik dari intervensi ini adalah konseling, bimbingan, pembinaan, manajemen stress hal ini bertujuan agar mengurangi tekanan, menumbuhkan kesadaran, tumbuhnya motivasi dan mengenal potensi. Kemampuan dan kelemahan yang ada dalam diri mereka.

Intervensi Mezzo digunakan untuk kelompok kecil, seperti kelompok, per group. Teknik yang digunakan untuk intervensi Mezzo adalah teknik pelatihan, dinamika kelompok dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok. Intervensi Makro ditujukan kepada komunitas dan masyarakat, dengan teknik kebijakan sosial, perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik. Tujuannya agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi, meningkatkan kinerja organisasi dan perubahan kebijakan.<sup>25</sup>

Secara umum, terdapat empat strategi (Tjahya Supriyatna, 2001: 72-73) yang dapat diterapkan ketika hendak melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama *the growth strategy* atau dapat dikatakan sebagai strategi

perubahan. Strategi perubahan sendiri memiliki arti bahwa untuk mencapai sebuah peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis yang didapat dari peningkatan pendapatan per kapita penduduk, permodalan, produktivitas pertanian dan kesempatan kerja dengan diimbangi kemampuan konsumsi masyarakat.

---

<sup>25</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora), 18-19

Kedua, *the welfare strategy* atau disebut dengan strategi kesejahteraan. Strategi ini dimaksudkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ketiga, *the responsive strategy* atau disebut juga dengan respon strategi. Strategi ini adalah respon dari strategi kesejahteraan, guna untuk mengatasi kebutuhan yang telah dirumuskan masyarakat itu sendiri dengan bantuan dari orang luar guna memperlancar usaha mandiri mereka melalui penggunaan teknologi dan juga sumber-sumber yang sesuai untuk kebutuhan proses pembangunan. Keempat, *the integrated or holistic strategy*. Strategi ini secara sistematis menggabungkan seluruh komponen dan unsur-unsur yang diperlukan guna mencapai tujuan yang menyangkut persamaan, pertumbuhan, kelangsungan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.<sup>26</sup>

Strategi menurut Morris dan Binstock memperkenalkan tiga strategi perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dan aksi yang dipakai untuk perubahan tersebut akan dilakukan melalui: (1) Memodifikasi pola sikap dan perilaku melalui pendidikan dan aksi-aksi lainnya; (2) Mengubah kondisi sosial dengan merubah kebijakan organisasi formal; (3) Reformasi peraturan dan sistem fungsional masyarakat.<sup>27</sup>

### c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditunjukkan pada sasaran agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih berdaya, berdaya saing, dan hidup mandiri dalam memberdayakan masyarakat. Pelaku pemberdayaan harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Karena prinsip-prinsip pemberdayaan menjadi sebuah acuan untuk agen pemberdayaan dapat melaksanakan tugasnya dengan

---

<sup>26</sup> Muhtadi & Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013)9-10

<sup>27</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), 60



benar. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan dilaksanakan dengan cara demokratis tanpa adanya paksaan.
- 2) Kegiatan pemberdayaan lebih difokuskan kepada kebutuhan, masalah dan potensi klien.
- 3) Sasaran atau klien dari pemberdayaan di tempatkan sebagai pelaku atau subjek dalam kegiatan pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan juga berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- 5) Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana proses tersebut memerlukan waktu, yang artinya pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 6) Kegiatan pemberdayaan harus dilakukan dengan sabar dan penuh kehati-hatian apalagi dalam menghadapi berbagai macam karakter, kebiasaan dan kebiasaan masyarakat.
- 7) Pemberdayaan harus dilakukan dalam berbagai aspek, tidak bisa hanya pada satu aspek.
- 8) Pemberdayaan terhadap kaum perempuan juga perlu dilakukan, terutama pada remaja, ibu-ibu muda. Mereka memiliki potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga, juga pengentasan kemiskinan.<sup>28</sup>
- 9) Kegiatan pemberdayaan dilakukan guna untuk membuat masyarakat terus belajar. Masyarakat harus dibiasakan untuk belajar dari berbagai sumber. Pemberdayaan juga perlu mengarahkan masyarakat untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja.
- 10) Pemberdayaan juga harus memperhatikan keanekaragaman budaya. Untuk itu agen pemberdayaan membutuhkan berbagai metode

---

<sup>28</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 59

dan pendekatan yang tetap sesuai dengan keadaan lapangan.

- 11) Pemberdayaan mengarahkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan juga berpartisipasi dalam menikmati hasil dari pemberdayaan.
- 12) Agen pemberdayaan perlu menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada klien sebagai bekal kemandirian untuk mereka.
- 13) Agen pemberdayaan yang melaksanakan pemberdayaan harus memiliki kemampuan yang dinamis, fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman, agen pemberdayaan hanya berperan sebagai fasilitator bukan guru ataupun mengurui.
- 14) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di dalam masyarakat, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha dan LSM.<sup>29</sup>

Banyak pendapat terkait dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah pendapat dari Bambang Shergi Laksomono (1989), sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besarnya meliputi dua aspek, yakni perubahan teknologi dan fisik dan juga perubahan sistem nilai dan sikap.
- 2) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, agar seluruh masyarakat dapat berkembang, terutama untuk masyarakat yang terbelakang.
- 3) Lebih mengutamakan pemanfaatan potensi dan juga sumber-sumber setempat. Sumber-sumber tersebut antara lain adalah faktor fisik, manusia

---

<sup>29</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 50

dan juga sosial. Banyak masyarakat yang masih kurang peka terhadap sumber dan potensi yang ada disekitarnya, hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan, model, pengetahuan dan juga teknologi atau sistem sosial budaya. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha dengan tujuan untuk memberikan dorongan dan meningkatkan sikap tanggap masyarakat terhadap potensi yang ada disekitarnya.<sup>30</sup>

- 4) Lebih mengedepankan inisiatif dan juga kreativitas masyarakat, dalam pemberdayaan ini masyarakat di tempatkan bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai pelaku atau subjek pembangunan.
- 5) Mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketika hendak menggerakkan partisipasi masyarakat, sebagai agen pemberdaya harus memberikan pemahaman secara luas dan merata tentang arti penting dari program pembangunan ini. Demikian partisipasi yang akan muncul adalah dikarenakan masyarakat paham dan sadar tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan.<sup>31</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporannya yang berkaitan dengan konsep dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, menjelaskan sepuluh prinsip yang dianggap dapat digunakan diseluruh dunia, sepuluh prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Program-program yang dilakukan harus berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Kemajuan lokal dapat dicapai melalui berbagai upaya yang tidak saling terkait dalam setaip bidang dasar, namun pemberdayaan masyarakat yang penuh dan seimbang mengharuskan

---

<sup>30</sup> Aam Muharam, *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*, ed. Adi Fahrudin (Bandung: Humaniora), 58

<sup>31</sup> Aam Muharam, *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*, ed. Adi Fahrudin (Bandung: Humaniora), 59

- mereka melakukan tindakan bersama dan menyusun program-program multi-tujuan.
- 3) Perubahan sikap masyarakat sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat mengarah pada partisipasi masyarakat yang meningkat dalam menghadapi masalah yang ada.
  - 5) Identifikasi, pemberian dorongan semangat dan juga pelatihan pemimpin lokal menjadi tujuan dasar setiap program.
  - 6) Kepercayaan yang besar kepada partisipasi para wanita dan pemuda dalam menjalankan sebuah proyek pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat program-program pembangunan.
  - 7) Agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara lancar dan efektif maka memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.
  - 8) Program pemberdayaan masyarakat dalam skala nasional maka memerlukan kebijakan yang tetap, pengaturan administrasi secara spesifik, perekrutan dan pendidikan personil, pengarahan sumber daya lokal dan nasional, eksperimen dan evaluasi.
  - 9) Sumber daya yang berbentuk organisasi non-pemerintahan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam program pemberdayaan masyarakat baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
  - 10) Kemajuan ekonomi dan sosial ditingkat lokal menentukan pembangunan yang serupa di tingkat nasional.<sup>32</sup>

Telah dijelaskan di atas tentang prinsip-prinsip pemberdayaan secara umum. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pemberdayaan menurut Al-Qur'an. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (anggot ansor) yang berpegang pada 3

---

<sup>32</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), 47-48

(tiga) prinsip utama yaitu prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awwun*, prinsip persamaan derajat.

Prinsip *ukhuwwah* dalam bahasa Arab memiliki arti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang muslim, mereka adalah bersaudara walaupun tidak ada ikatan darah. Rasa persaudaraan ini dapat menjamin rasa empati dan saling merekatkan hubungan silaturrahi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat:10)

Konteks *ukhuwwah* ini merupakan motif yang menjadi dasar dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi, masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya agar mau untuk membantu dan saling meringankan beban yang dihadapi oleh saudaranya. Sesuai sabda Rasulullah "barang siapa yang meringankan beban dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat".

Prinsip kedua adalah *ta'awwun*, *ta'awwun* memiliki arti saling tolong menolong. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong sesuai firman Allah dalam Surat Al-Maiddah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ ط

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Sesungguhnya program pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menolong individu atau masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus didasari dari rasa peduli dan niat untuk menolong individu atau masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu tetapi pemberdayaan merupakan tanggung jawab bersama untuk itu jika ingin pemberdayaan dapat berhasil harus ada kekompakan antara yang membutuhkan dan yang membantu.<sup>33</sup>

Prinsip ketiga yaitu persamaan derajat antar umat manusia, islam telah mengumumkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Sesuai firman Allah tentang persamaan derajat antar umat manusia dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

إِيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat di atas menjelaskan bahwa persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada dihadapan Allah hanyalah iman dan takwa. Ayat diatas juga menegaskan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan bukanlah sumber

---

<sup>33</sup> Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no 1 (2019): 35-36

perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* untuk saling tolong menolong untuk sesama.<sup>34</sup>

#### d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka serta meningkatkan harkat dan juga martabat mereka.<sup>35</sup>

Selain itu tujuan lain dari program pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang lemah.<sup>36</sup> Selain dua tujuan diatas masih banyak tujuan dilakukannya program pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut

##### 1) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Proses pemberdayaan ini diharapkan dapat untuk memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan.

##### 2) Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan usaha ini dapat di usahakan melalui perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, perbaikan kelembagaan dan perbaikan kegiatan usaha bisnis.

##### 3) Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Setelah adanya perbaikan bisnis yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh. Meningkatnya pendapatan, maka masyarakat atau individu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

##### 4) Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Ketika pendapatan sudah membaik, dengan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial).

<sup>34</sup> Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no 1 (2019): 36

<sup>35</sup> Abu Suhud, dkk., *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan IISEP Cida, 2005), 5

<sup>36</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2005), 60

Kemiskinan atau pendapatan yang terbatas ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.

5) Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Saat pendapatan dan lingkungan sudah membaik maka diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan masyarakat maupun setiap keluarga,

6) Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang telah membaik, dan didukung pula oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik dari sebelumnya, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>37</sup>

Selain beberapa tujuan diatas masih ada banyak tujuan diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Ibnu Khaldun dalam tulisannya sebagai berikut:

1) Individu

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu secara individu atau perorangan di berikan kelebihan. Namun secara *qudrati* manusia masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan selain mereka memiliki kelebihan. Sehingga kelebihan yang mereka miliki harus mereka bina agar dapat dikembangkan potensinya.

2) *Ashabiyah*

*Ashabiyah* bisa disebut juga dengan nama kekeluargaan. Menurut Ibnu Khaldun jika sikap kekeluargaan ini diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan maka yang mengarah kepada sikap religious untuk menjalankan amalan *amar ma'ruf nahi munkar*.

---

<sup>37</sup> Aprilia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 153-154



3) Masyarakat *ijtima' al-insani*

Ketika masyarakat memiliki sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan juga solidaritas maka akan tercipta sistem sosial masyarakat yang terdapat pada al-ijtima' al-insani dengan sendirinya.

4) Negara

Negara adalah tempat dan juga alat untuk memulai kepemimpinan, konstitusi atau undang-undang guna menciptakan suatu tatanan dan juga aturan bagi masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama islam.

5) Peradaban

Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat madani dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tercipta masyarakat makmur dan sejahtera<sup>38</sup>

### 3. Gerakan Pemuda (GP) Ansor

a. Sejarah Berdirinya Gerakan Pemuda Ansor

Lahirnya GP (Gerakan Pemuda) Ansor muncul dari berkembangnya organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Yang muncul pada tahun 1916, organisasi Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansyur, H. Abdul Kahar dan Soetoyo Suto, dengan tujuan agar meningkatkan kualitas pendidikan islam dan membentuk pemuda yang bukan hanya taat agama tetapi juga pandai dalam bidang sosial.<sup>39</sup>

Pada tahun 1918, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Ahmad Dahlan mendirikan *Tashwirul Afkar*, yang memiliki arti forum diskusi ilmiah

---

<sup>38</sup> Muhtadi & Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), 8-9

<sup>39</sup> Muhammad Ainun Najib, "Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Deradikalisasi Keagamaan di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo", (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 32-33

keagamaan dengan mempertemukan kelompok dari pesantren dan modernis.<sup>40</sup> Surabaya, tanggal 14 Desember 1949, Gerakan Pemuda Ansor berdiri. Sebagai kelanjutan dari organisasi Anshoru Nahdlatul Ulama (ANU) yang berdiri pada tanggal 24 April 1934.

Berdirinya Gerakan Pemuda Ansor tidak lepas dari kelahiran Nahdlatul Ulama, karena sesungguhnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 1924 di Surabaya berdiri organisasi pemuda yang dengan sebutan *Syubhanul Wathan* (pemuda tanah air) yang berada dibawah pimpinan Abdullah Ubaid. Dengan kegiatan utama mereka adalah dakwah keliling, latihan kepemimpinan dan latihan bela diri.

Pada tahun 1930, *Syubhanul Wathan* merubah namanya menjadi *Nahdlatul Syubban*, dan pada tahun 1931 *Nahdlatul Syubban* mengganti nama lagi menjadi "Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama (PPNU)", selang satu tahun kata "Persatuan" dihilangkan dan hanya menjadi "Pemuda Nahdlatul Ulama (PNU), tidak lama dari itu berubah nama lagi mejadi "Anshoru Nahdlatul Ulama (ANU)". Pada ulang tahun NU yang ke-9 di Banyuwangi pada tanggal 21-26 April 1934 ANU diterima menjadi bagian dari jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Selama perubahan tatanan, ANU dibekukan. Akan tetapi seorang tokoh ANU dari Surabaya yang bernama Muhammad Husaini mengemukakan idenya untuk kembali menghidupkan ANU. Pada pertemuan tersebut tercapailah sebuah kesepakatan untuk kembali menghidupkan ANU dengan nama yang baru yaitu "Gerakan Pemuda Ansor" atau disingkat dengan sebutan GP Ansor.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "*Menatap Masa Depan NU Membangkitkan Spirit Taswirul Afkar Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 12

<sup>41</sup> "Sejarah Berdirinya Gerakan Pemuda Ansor", Radarbangsa.com diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

- b. Tujuan Gerakan Pemuda Ansor
- 1) Membentuk dan juga mengembangkan pemuda Indonesia sebagai kader yang cerdas dan tangguh, mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT, pribadi yang baik, memiliki akhlak mulia, patriotik, terampil, sehat, ikhlas dan juga beramal sholeh.
  - 2) Mengajarkan ajaran islam *ahlusunnah wal jama'ah* di masyarakat lingkungan sekitar.
  - 3) Ikut berperan aktif dan juga kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, memiliki rasa kemanusiaan, dan memiliki martabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
  - 4) Mengembangkan kewirausahaan di kalangan para pemuda baik itu secara individu ataupun secara berkelembagaan sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat.<sup>42</sup>
- c. Arti Lambang Gerakan Pemuda Ansor
- 1) Segitiga garis alas memiliki arti tauhid, garis dari sisi kanan memiliki arti fiqih dan garis pada sisi kiri artinya adalah *tassawwuf*.
  - 2) Segitiga sama sisi berarti keseimbangan dalam pelaksanaan ajaran agama islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah* yang tidak lain adalah iman, Islam dan Ihsan atau Tauhid, Ilmu Fiqih dan Ilmu *Tassawuf*.
  - 3) Garis tebal dibagian luar dan garis tipis dibagian dalam segitiga memiliki arti keserasian dan keharmonisan antara pemimpin (garis tebal) dan bawahannya atau orang yang dipimpin (garis tipis).
  - 4) Warna hijau memiliki arti kedamaian, kesejahteraan dan kebenaran.

---

<https://www.radarbangsa.com/khazanah/12670/sejarah-berdirinya-gp-ansor-diambil-dari-golongan-sahabat-penolong-nabi>

<sup>42</sup> "Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor", (Jakarta: Seketariat Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2016), 6-8

- 5) Bulan sabit memiliki makna kepemudaan.
- 6) Sembilan bintang
  - a) Satu bintang besar berarti Sunnah Rasulullah
  - b) Empat bintang pada sebelah kanan adalah sahabat para Nabi yaitu *Khulafau'r rasyidin*.
  - c) Simbol empat bintang disebelah kiri adalah simbol dari empat Madzhab yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali
- 7) Tiga sinar kebawah memiliki arti yaitu pancara cahaya yang menjadi dasar-dasar agama, yakni iman, islam dan ihsan.
- 8) Lima sinar ke atas memiliki makna tentang pelaksanaan rukun islam yang terdiri dari lima poin yaitu, syahadat, sholat, zakat, puasa dan naik haji bagi yang mampu, terkhusus untuk sholat lima waktu.
- 9) Jumlah delapan sinar yang ada memiliki arti pancaran semangat perjuangan dari delapan *asbabul khafi* dalam menegakkan hak dan keadilan dan menentang kebathilan juga kedzaliman serta menyebarkan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.
- 10) Tulisan ANSOR yang ditulis tebal dengan penggunaan huruf besar memiliki makna ketegasan sikap dan juga pendirian.<sup>43</sup>

#### 4. Sekolah Pemberdayaan Desa

##### a. Definisi Sekolah Pemberdayaan Desa

Sekolah pemberdayaan desa merupakan sebuah kegiatan pertemuan yang dilakukan secara berkala, dan diikuti oleh sekelompok orang atau komunitas pada kegiatan tertentu. Kegiatannya bisa berbentuk seminar dan juga diskusi ataupun nanti bisa dalam bentuk praktek. Selain itu kita juga dapat mendengarkan pendapat dari teman-teman yang

---

<sup>43</sup> Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor", (Jakarta: Sekretariat Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 2016), 17-18

tergabung dalam forum tersebut dan juga dapat mendengarkan pengalaman (*sharing*) tentang masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun juga masalah yang ada di desa dan cara penyelesaiannya.

b. Tujuan Sekolah pemberdayaan desa

Sekolah pemberdayana desa ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat atau komunitas dan dapat membantu mereka dalam memberdayakan diri, agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain apalagi menunggu bantuan dari pemerintahan.<sup>44</sup>

c. Struktur Organisasi Sekolah Pemberdayaan

Komite Sekolah, untuk Sekolah pemberdayaan adalah Itqonul Hakim, Kepala Sekolah Achwan Ahadi Ihsan, Kepala Tata Usaha Andi Syaifuddin, Bendahara Rukani, Wakakesiswaan Muhammad Irfansyah, Wakakurikulum Suprpto.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu sumber yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal dan skripsi dengan melihat hasil penelitiannya dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya dengan menganalisa berdasarkan keadaan dan waktu berbeda. Hasil yang dibaca oleh peneliti akan memberikan landasan teoritis yang kuat berkaitan dengan variabel penelitian yang diteliti. Hasil penelitian yang dibaca akan mampu untuk memberikan keyakinan arti pentingnya dan posisi penelitian berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian terdahulu yang menjadi ladasan dilakukannya penelitian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muslikatul Mukaromah dengan judul **Pengembangan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Lokal (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Batik Sekar di Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan).**

---

<sup>44</sup> Achwan Ahadi Ihsan, wawancara oleh penulis, 13 September 2020, transkrip

Hasil dari penelitiannya yaitu pelaksanaan di Desa Putat atas pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi lokal yang menghasilkan kerajinan Batik Sekar sudah dimulai sejak tahun 2010. Kelompok Usaha Bersama Batik Sekar ini merupakan program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Upaya dari tindak lanjut KUB Batik Sekar dalam proses pemberdayaan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan memberikan pelatihan kepada para warganya. Setelah mendapatkan pelatihan KUB Batik Sekar mendapatkan dana dari Kabupaten sebagai modal produksi, namun ditengah praktik pembuatannya hasil batiknya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau dikatakan gagal. Saat itu batik sekar mulai mengalami kesulitan, dan selama 7 bulan pegawai tidak mendapatkan gaji. Hingga ada 9 orang yang mengundurkan diri dari anggota. Namun berkat dari kegigihan anggota yang tersisa tadi, kini batik sekar telah menuai hasilnya, perkembangan yang sangat membanggakan dan potensial untuk terus ditingkatkan dan sekarang kerajinan batik di Desa Putat sudah berkembang menjadi 5 KUB (Kelompok Usaha Bersama), ada Batik Sekar, Batik Arum Sari, Batik Gatutkaca, Batik Lestari dan terakhir Batik Seruni.<sup>45</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek dan juga objeknya berbeda.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mu'amar Ramadhan tahun 2019 dengan judul **Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Ormas Keagamaan Gerakan Wirausaha GP Ansor Desa Kendalrejo Pemalang**. Hasil dari penelitiannya yakni pemberdayaan kewirausahaan yang berada di Desa Kendalrejo dengan basis ormas keagamaan gerakan wirausaha GP Ansor. Sebagai salah satu organisasi yang berbadan otonom, Gerakan Pemuda Ansor memiliki tugas pada bidang *fikrah*, *amaliyah* dan *harkah*. Bidang *fikrah* mengacu pada *manhaj* berfikir

---

<sup>45</sup> Muslikasul Mukaromah, "Pengembangan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Lokal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Bersama Batik Sekar di Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 79-81

Ahlu Sunnah wal-Jama'ah, pada bidang *'amaliyah* mengacu pada tiga aspek yaitu a) *'aqidah ala manhaj* b) aspek fikih mengacu pada empat mazhab, c) aspek tasawuf. Adapun pada bidang *harkah* mengacu pada spirit kebangsaan, persaudaraan, toleransi, keutamaan dan ekonomi. Gerakan ekonomi bagi Gerakan Pemuda Ansor menjadi bagian penting yang menjadi program organisasi. Hal ini diperlukan usaha yang serius dalam pemberdayaan kader untuk mengakses bidang ekonomi berdasar aturan fiqh mu'amalah. Gerakan Pemuda Ansor Desa Kendalrejo Petarukan Peralang berusaha untuk melihat peluang bisnis bagi para kader. Karena terdapat pemikiran bahwa berjalannya organisasi akan dipengaruhi oleh pendanaan yang signifikan, untuk dapat menggerakkan organisasi dan kader sekaligus diperlukan upaya yang serius untuk menggarap bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi yang ada.<sup>46</sup>

Melalui pemikiran tersebut Gerakan Pemuda Ansor Desa Kendalrejo Peralang mulai melakukan pengamatan peluang ekonomi yang cocok untuk kadernya. Hasil pengamatan yang diperoleh Gerakan Pemuda Ansor bahwa peluang usaha perdagangan saat ini sangat bagus. Maka pengurus dari Gerakan Pemuda Ansor membuat program kewirausahaan yang nantinya akan dikelola oleh kader dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Kendalrejo Peralang sendiri. Jenis kewirausahaan yang dijalankan oleh GP Ansor Kendalrejo ini adalah 1) Kedai Kopi, 2) Toko Kelontong, 3) Kantin Madrasah, 4) Outlate Bakar.<sup>47</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan yang dilaksanakan oleh peneliti adalah persamaan subjek yaitu GP Ansor yang sama-sama melakukan pemberdayaan kepada anggotanya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan peneliti adalah metode pemberdayaan yang digunakan. Metode pemberdayaan yang digunakan peneliti adalah metode pelatihan partisipatif sedangkan metode

---

<sup>46</sup> Mu'amar Ramadhan, Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Ormas Keagamaan Gerakan Wirausaha GP Ansor Desa Kendalrejo Peralang, *Dimas* 19, no 1 (2019), 108

<sup>47</sup> Mu'amar Ramadhan, Pemberdayaan Kewirausahaan Berbasis Ormas Keagamaan Gerakan Wirausaha GP Ansor Desa Kendalrejo Peralang, *Dimas* 19, no 1 (2019), 114

pemberdayaan yang digunakan oleh penelitian terdahulu ini adalah metode *focus group discussion* (FGD).

3. Jurnal yang ditulis oleh Iin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana, tahun 2013 dengan judul **Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang**. Hasil dari penelitiannya adalah metode pemberdayaan yang digunakan untuk masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan laut adalah sebuah kawasan yang dinamis dan strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup diareal sekitar panatai, dan sebagian besar penghasilan mereka didapat dari hasil laut ataupun disebut mereka berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat pantai terkadang terlupakan oleh pembangunan, sebab kebijakan pemerintah yang hanya berfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir penelitian yang dilakukan oleh Iin Indarti ini menggunakan metode pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan dari lembaga koperasi. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan ini adalah metode *Participatory Rural Apraisal* (PRA). Hasil dari menggunakan metode pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan dari koprasi ini adalah 1) membangun *economies of scale* dalam setiap transaksi di pasar input maupun di pasar output, 2) meningkatnya produktivitas karena peluang kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka, 3) memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu kedalam kelompok.<sup>48</sup>Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang metode yang sesuai dengan keadaan tempat penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah tempat, waktu dan juga subjek. Subjek yang digunakan oleh peneliti adalah anggota dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

---

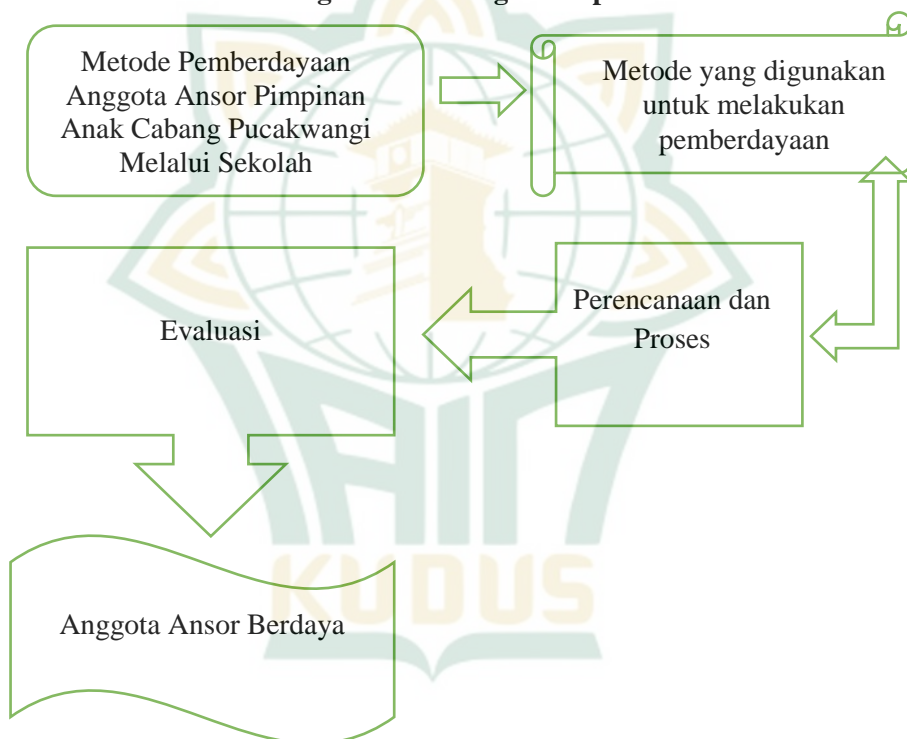
<sup>48</sup> Iin Indarti, Dwiyadi Surya Wardana, "Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir Kota Semarang", *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17, no 1 (2013), 75



### C. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono, kerangka berfikir adalah suatu konsep tentang bagaimana teori berhubungan faktor-faktor yang digunakan sebagai yang membahas tentang masalah itu.<sup>49</sup> Kerangka berfikir adalah suatu penjabaran agar mendapat jawaban sementara mengenai masalah yang telah dirumuskan dan akan ditindak lanjuti. Lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan berikut<sup>50</sup>:

**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**



Pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menjadikan suatu kelompok atau organisasi lebih berdaya dan proses pemberdayaan yang dilakukan diutamakan untuk kelompok lemah. Dari kerangka berfikir di atas menjelaskan mengenai penelitian

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91

<sup>50</sup> Sadjidan, Dwija Utama, *Jurnal Pendidikan*, ISSN 1979-9098, 2008, 56

yang nanti akan digunakan oleh peneliti yaitu metode pemberdayaan yang digunakan oleh Pimpinan Anak Cabang dalam melakukan pemberdayaan terhadap kader-kader Gerakan Pemuda Ansor Pucakwangi. Peneliti mengambil subjek anggota atau kader-kader GP Ansor Pucakwangi dan mereka sebagai pelaku dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pucakwangi. Metode pemberdayaan yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap anggota Gerakan pemuda Ansor Pucakwangi ini adalah metode pemberdayaan pelatihan partisipatif.

Perencanaan yang dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang Pucakwangi adalah merencanakan kegiatan yang dalam kegiatan perencanaan ini melibatkan anggota Gerakan Pemuda Ansor untuk ikut serta dalam kegiatan yang akan diadakan oleh PAC. Proses kegiatan pemberdayaan diikuti oleh setiap ranting yang ada di Pucakwangi. Setelah proses kegiatan pemberdayaan telah selesai dilakukan maka akan diadakan evaluasi oleh Pimpinan Anak Cabang, untuk mengetahui bahwa kegiatan pemberdayaan tersebut telah sukses atau masih harus ada yang perlu diperbaiki. Ketika hasil evaluasi mengenai kegiatan yang diadakan oleh PAC menggunakan pelatihan partisipatif. Anggota Gerakan Pemuda Ansor aktif dalam setiap kegiatan dan sudah mulai ikut terjun kemasyarakat maka anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dikatakan berdaya.